

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian nasional yang berdasar dan berorientasi kerakyatan merupakan derivasi dari paham kebangsaan dan kerakyatan. Bangsa Indonesia menghendaki sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan menjadi sokoguru perekonomian nasional. Secara jelas, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan secara prinsip tentang bangun perekonomian nasional yang disusun oleh kekuatan ekonomi rakyat. Salah satu wujud usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan adalah koperasi dan usaha kecil menengah. Kelompok usaha tersebut sangat besar kontribusinya dalam perekonomian Indonesia, jika dilihat dari aspek-aspek seperti peningkatan kesempatan kerja, sumber pendapatan, pembangunan ekonomi perdesaan dan peningkatan ekspor non-migas.

Usaha mikro selalu hadir dalam setiap perekonomian suatu negara, karena memang perannya diperlukan. Ketika perekonomian nasional dilanda krisis ekonomi pada juli 1997, usaha mikro merupakan salah satu sektor usaha yang dapat menjadi penyelamat perekonomian bangsa karena kemampuannya yang memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta banyak menyerap tenaga kerja. Sejak saat itu peran usaha mikro dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi maupun kontribusinya selalu meningkat. Tingkat keberhasilan usaha mikro ini dikarenakan 1) usaha mikro

tidak memiliki banyak hutang terhadap luar negeri dan sedikit hutang terhadap perbankan. 2) sektor kegiatan usaha mikro seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan lain-lainnya menggunakan bahan baku lokal. 3) usaha mikro tidak bergantung pada impor dan hasilnya dapat di ekspor.

Secara umum keberadaan usaha mikro telah mendapat perhatian khusus bagi pemerintah, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2004-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2005, telah menetapkan arah kebijakan dan program pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sejalan dengan itu, peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia selama ini menunjukkan posisi strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan :

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Perkembangan usaha mikro secara kuantitas tidak dapat diragukan, dan banyak para ekonom berpendapat bahwa sektor-sektor ekonomi yang banyak ditangani usaha mikro, kecil dan menengah ini merupakan bidang usaha yang dapat memberi peluang upaya mereplikasi unit usaha baru dan memunculkan wirausaha sejati di dalamnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012, menunjukkan bahwa dari sekitar 56 juta UMKM Indonesia, sekitar 98,9% di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, dan hanya 500.000 unit lainnya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah, dan sisanya adalah pelaku usaha besar.<sup>1</sup> Keberadaan usaha mikro ini telah memberikan kontribusi secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 107 juta orang.

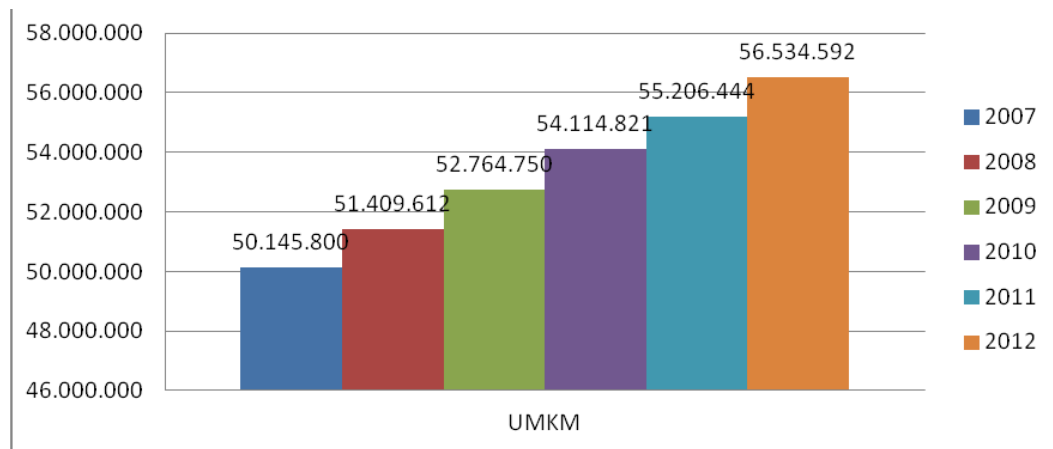
**Tabel I.1**

**Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Industri	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
UMKM	50.145.800	51.409.612	52.764.750	54.114.821	55.206.444	56.534.592	320.176.019
Usaha Besar	4.463	4.650	4.676	5.150	4.952	4.968	28.859
Jumlah	50.150.263	51.414.262	52.769.426	54.119.971	55.211.396	56.539.560	320.204.878

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2013

<sup>1</sup> [www.BPS.go.id/usahamikrokecil](http://www.BPS.go.id/usahamikrokecil), Jakarta, 15.12.14, Di unduh 20.01.15



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2013

**Gambar I.1**

### **Perkembangan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia menunjukkan tahun 2007 jumlah UMKM berkisar 50,1 juta unit usaha, dan terjadi peningkatan pada 2012 bertambah menjadi 56,3 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. Maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5% dengan pertumbuhan usaha mikro tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta pelaku usaha mikro terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil.

Dari data tersebut, tampak bahwa jumlah usaha kecil sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Penyerapan tenaga

kerja tersebut selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penumbuhan usaha kecil menjadi suatu kebijakan strategis dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perkembangannya, UMKM mengalami permasalahan, berikut ini berbagai permasalahan krusial yang dihadapi UMKM, yaitu :

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau organisasi yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM, meskipun dari tahun ketahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha pengusaha besar.

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan

kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Azasi Manusia (HAM), serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering dipergunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UMKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Sifat Produk dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Pengembangan UKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya

kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. Misalnya, kredit usaha kecil (KUK), namun apa yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberian kredit tersebut, belum dirasakan manfaatnya oleh sektor usaha mikro.

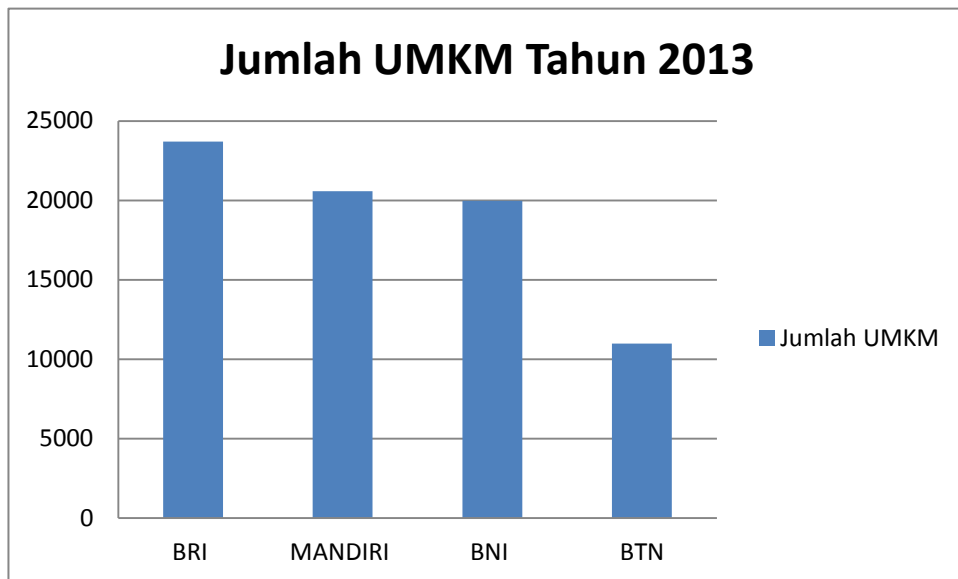
Masalah UMKM kesulitan memperoleh akses pendanaan daribank, karena UMKM mendapat perlakuan diskriminatif yang menyangkut status hukum sebagai usaha perorangan. Perlakuan diskriminatif untuk mendapat hak yang sama dengan pengusaha besar dapat dilihat dari tidak adanya hak mendapat suku bunga premium yang murah. Dalam hal agunan, UMKM tidak mampu menembus sistem perbankan dengan pola personnel guarantee sehingga agunan yang dipersyaratkan pihak bank kepada UMKM mengandung prosedur berbelit-belit dan berlebihan. Untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien.

Meskipun pemerintah telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengeluarkan sejumlah keputusan maupun peraturan dan undang-undang, akan tetapi hal ini dirasakan belum memenuhi harapan pengusaha kecil dan menengah dimana masih dijumpai keterbatasan akses usaha kecil dan menengah terhadap sumber modal untuk pengembangan usahanya.



Menyadari hal diatas maka pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui Kementrian BUMN menerbitkan Keputusan Mentri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran strategi dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi berskala kecil.

Program kemitraan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan peluang bagi UKM mengembangkan usahanya. Dengan adanya kerja sama antara Usaha Kecil dan Menengah dengan BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, mengakses sumber permodalan, menyerap pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konsep ini kemitraan adalah suatu pembinaan strategis yang dapat memberikan peluang kepada usaha kecil, sehingga dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan ekonomi yang tangguh, mandiri dan memiliki daya saing. Perputaran bisnis ibarat roda yang terus berputar, untuk selalu diatas kita harus menyiapkan segudang amunisi yang banyak, agar dikala terjadi permintaan barang atas produk kita, kita dapat memenuhi pesanan tersebut.



Sumber : Data Diolah, Tahun 2015

**Gambar I.2**

### **Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Binaan Bank BUMN**

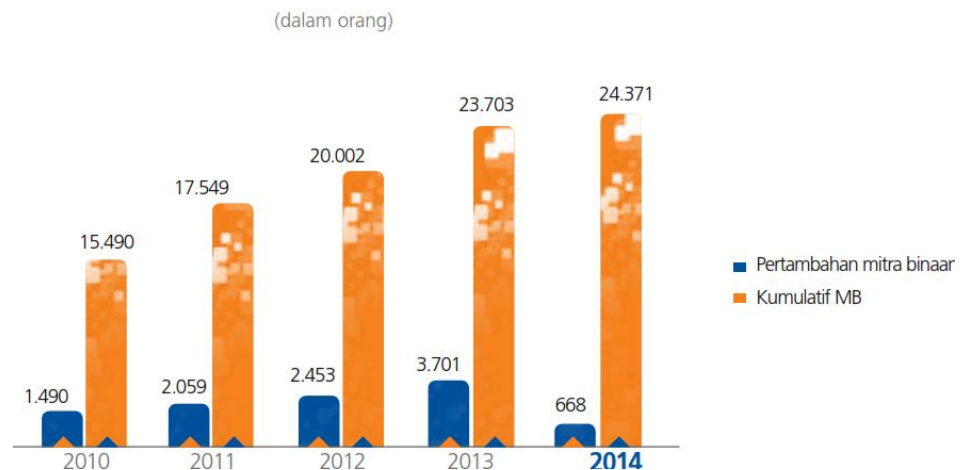
Dari gambar tersebut pada tahun 2013 jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi binaan bank BUMN mencapai 75.246. Usaha mikro, kecil dan menengah BUMN ini meenjadi mitra binaanya sejak tahun 1990an. Bank BRI menjadi bank yang sudah banyak memiliki usaha mikro, kecil dan menengah binaan. Bank BRI bisa menjadi dengan BUMN terbanyak UMKM binaannya dikarenakan Bank BRI memulai program kemitraan usahanya berdiri terlebih dahulu.

Sebagai Bank BUMN terbesar di Indonesia PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. sangat peduli terhadap para pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan menengah. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. merupakan bank milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan . PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk

menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Sebagai salah satu Bank BUMN terbesar di Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran dan tanggung jawab sosial PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dilaksanakan salah satunya melalui SME & SR (Small Medium Enterprise & Social Responsibility) Partnership Program atau lebih dikenal dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sebagaimana yang diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal tersebut diharapkan akan dapat mendukung kegiatan usaha PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk maupun mitra bisnis. Semangat PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam melaksanakan PKBL merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI), berdiri dan beroperasi sejak tahun 1990

dengan nama Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PPELK), dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penyaluran dana untuk program ini.



Sumber : Laporan Tahunan PKBL BRI 2014

### Gambar I.3

#### Perkembangan Mitra binaan BRI

Binaan PKBL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) yang telah mandiri dan tangguh, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan pesatnya perkembangan usaha mereka. Saat ini mereka telah melakukan aktivitas pemasaran tidak hanya menjangkau pasar dalam negeri tetapi juga hingga merambah ke luar negeri.<sup>2</sup>Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan dan eksistensi PKBL telah diakui secara luas. Dengan memanfaatkan seluruh sektor, PKBL menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu memberikan hasil maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu mereka

<sup>2</sup> BRI. PKBL BRI. 2014. <http://bangga-berindonesia.com> (Diakses tanggal 05 Februari 2015)

juga mampu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



Sumber : Laporan Tahunan PKBL BRI 2014

**Gambar I.4**

#### **Perkembangan Penyaluran Dana Program Kemitraan**

Sejak melaksanakan Program Kemitraan dari tahun 1990 hingga tahun 2014, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) telah melakukan pembinaan kepada lebih kurang 5.000 mitra binaan usaha kecil dengan total nilai pinjaman mencapai kurang lebih Rp 1 triliun. Berdasarkan RUPS PKBL 2014, dari anggaran PKBL untuk dana Program Kemitraan tahun 2014 sebesar Rp 29,1 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 29,32 miliar atau mencapai 103,6%. Selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2014 PKBL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) berhasil menambah sebanyak lebih kurang 600 mitra binaan. Dana pinjaman yang disalurkan

selama tahun 2014 tersebut tersebar ke beberapa daerah di Indonesia dan mencakup beberapa sektor.

Untuk tahun 2014, jumlah realisasi penyaluran dana PK untuk pemberdayaan ekonomi kecil senilai Rp 29,15 miliar dan dana pembinaan yang disalurkan kepada mitra binaan tahun 2014 sebesar Rp 172,5 juta. Penyaluran pada tahun 2014 mengalami penurunan dikarenakan perubahan tata kelola Program Kemitraan dalam organisasi internal BRI, dengan tujuan untuk mengembangkan lebih besar dan lebih baik lagi program pemberdayaan ekonomi yang menjadi tujuan utama Program Kemitraan.

Selain penyaluran dana untuk Program Kemitraan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) juga menyalurkan dana untuk Pembinaan. Realisasi penyaluran dana hibah (Pembinaan) dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp 172,5 juta, atau mencapai 85,93% dari anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 200 juta . Beberapa program pembinaan yang dilakukan diantaranya turut serta dalam berbagai kegiatan, seperti pameran tingkat nasional maupun internasional untuk memperkenalkan produk-produk mitra binaan, pelatihan seperti seminar kewirausahaan, workshop mengenai ekspor impor dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel I.2

## Laporan Kuantitas Pinjaman Mitra Binaan Bank BRI DKI Jakarta

No	Kantor Wilayah	Industri Pengolahan	Jasa Lainnya	Konstruksi	Listrik, Gas, dan Air	Pengangkutan, Perdagangan, dan Komunikasi	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	Pertambangan	Pertanian	Perumahan	Jumlah
5	DKI Jakarta 1										
	Lancar	10.279.900	36.686.000	-	-	63.755.267	284.455.700	-	199.934.284	10.810.520	605.921.671
	Kurang Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diragukan	-	-	-	-	-	18.404.500	-	-	-	18.404.500
	Macet	-	-	-	-	-	66.561.226	-	-	-	66.561.226
	Sub jumlah	10.279.900	36.686.000	-	-	63.755.267	369.421.426	-	199.934.284	10.810.520	690.887.397
6	DKI Jakarta 2										
	Lancar	-	50.750.367	-	-	128.125.236	1.633.558.799	-	271.770.864	9.849.200	2.094.054.466
	Kurang Lancar	-	6.827.430	-	-	8.353.800	221.209.262	-	18.149.266	-	254.539.758
	Diragukan	-	-	-	-	36.094.333	66.048.600	-	-	-	102.142.933
	Macet	-	131.792.200	-	-	-	170.783.312	-	-	-	302.575.512
	Sub jumlah	-	189.369.997	-	-	172.573.369	2.091.599.973	-	289.920.130	9.849.200	2.753.312.669

Sumber : Laporan Tahunan PKBL BRI 2014

Pada tabel tersebut dapat di ketahui bahwa kualitas pinjaman mitra binaan bank BRI tahun 2013. Pada wilayah DKI Jakarta 1 dan 2 Bank BRI sudah menyalurkan dana melalui program kemitraan usaha sebesar kurang lebih 2,9 M untuk mitra binaanya. Dari dana sebesar 2,9 M sekitar 2,8 M pinjaman dana tersebut sudah di kembalikan kepada bank BRI. Ini menunjukkan bahwa program kemitraan usaha yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan berhasil. Hanya sekitar 1 M dana pinjaman kemitraan usaha yang belum dikembalikan mitra binaannya. Sekitar 350 juta dana pinjaman program kemitraan usaha yang disalurkan kepada usaha mikro dan kecil macet.

Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis mitra binaan tergantung kepada keahlian pelaku usaha di bidang pemasaran, produksi,

keuangan maupun bidang lain. Selain itu tergantung pula pada kemampuan pengusaha kecil untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan usaha adalah mencari laba. Keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Usaha dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, akan mampu mengatasi tantangan dari para pesaing terutama dalam bidang pemasaran.

Untuk mendukung dan memastikan tumbuh dan berkembangnya usaha mitra binaan, BRI memberikan dana hibah program pembinaan kemitraan yang ditujukan untuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan program lain yang dapat meningkatkan produktivitas maupun perkembangan usaha Mitra Binaan BRI. Dengan dukungan dana tersebut, para Mitra Binaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis usaha, menambah wawasan dan ikut serta berpartisipasi dalam pameran-pameran untuk membuka pemasaran produknya.

Realisasi dana hibah pembinaan kemitraan pada tahun 2014 sebesar Rp 172,5 juta. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan promosi pemasaran produk mitra binaan melalui pameran yang diselenggarakan diberbagai tempat, baik di tingkat daerah, nasional maupun di manca negara. Melalui keikutsertaan pada berbagai event tersebut, baik pelatihan maupun pameran, diharapkan para mitra binaan memiliki kesempatan untuk memperluas akses



pasar produknya dan memperluas jaringan usaha. Selain itu, diharapkan mitra binaan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gambaran maupun informasi mengenai trend selera pasar terkini.

**Tabel I.3**

**Kegiatan Pameran dan Promosi**

	<b>Pameran</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>
1	Pameran Gelar Inovasi UMKM & PKBL Expo 2014	8-11 Mei 2014	Semarang, Java Supermall Java Supermall Semarang
2	Jakarta Great Sale 2014	7 Juni-19 Juli 2014	7 Mall di Jakarta
3	Trade Mission Brunei Darussalam - Indonesia	7 Oktober 2014	Jakarta, Gedung BRI Sudirman

Sumber : Laporan Tahunan PKBL BRI 2014

Dari uraian tersebut maka timbul keinginan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul berikut: “ Pengaruh Kemitraan Usaha dan Strategi Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI)”.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) sebagai berikut :

1. Permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI)
2. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro

- kecil dan menengah (UMKM) binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI)
3. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang terkait mengenai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI)
  4. Kemampuan bersaing antar pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) binaan
  5. Program Kemitraan Usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) untuk membina binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI)
  6. Karakteristik Wirausaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI)

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah terlihat bahwa Perkembangan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia dan dipengaruhi berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, peneliti membataskan masalah pada “Pengaruh Kemitraan Usaha dan Strategi Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI)”.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah program kemitraan usaha berpengaruh langsung terhadap keberhasilan usaha mikro kecil binaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.?
2. Apakah strategi pemasaran berpengaruh langsung terhadap keberhasilan usaha mikro kecil binaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.?
3. Apakah program kemitraan usaha dan strategi pemasaran berpengaruh langsung terhadap keberhasilan usaha mikro kecil binaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu manajemen kewirausahaan mengenai program kemitraan dan pengaruhnya terhadap pengembangan UKM mitra binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) .

- Memperkaya khasanah studi empiris bagi para peneliti yang berkecimpung dalam kajian ekonomi kewirausahaan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian serupa dimasa mendatang.

## 2. Kegunaan praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UMKM mitra binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk(BRI) dalam mengkaji kegiatan kemitraan untuk pengembangan UMKM.